

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Jalan Raya Gandul Nomor 4, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok

Telpon (021)7540077 - 7543708; Fax. (021) 7543708/09  7540124

****

**SAMBUTAN**

**KEPALA BADAN**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**



**Pada**

**PEMBUKAAN**

**PELATIHAN**

**TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ( SPPA)**

**ANGKATAN LXV (65)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.***

***Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.***

***Salam Pembelajar***

Yang Saya Hormati :

* Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
* Para Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
* Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
* Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
* Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
* Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
* Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan RI;
* Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI;
* Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia;
* Direktur POLTEKIM dan Direktur POLTEKIP;
* Para Administrator dan Koordinator serta Pengawas dan Sub Koordinator di lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
* Undangan; serta
* Para peserta Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan LXV (65) yang saya banggakan.

Mengawali sambutan ini, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan LXV (65) yang diselenggarakan secara virtual di tengah pandemi yang masih terjadi di negara kita.

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah pencegahan virus COVID-19, salah satunya dengan memberikan layanan vaksinasi terhadap seluruh pegawai secara bertahap, sebagai wujud kepedulian kepada ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar terhindar dari virus COVID-19 sehingga tetap dapat berkinerja dengan baik.

Sekaligus saya menghimbau kepada Saudara sekalian agar tetap konsisten dalam mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan senantiasa menerapkan gerakan 5M (Mencuci tangan dengan sabun, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi dengan orang lain) dalam aktifitas sehari hari.

Sekaligus mari bersama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bangkit kembali dalam membangun perekonomian bangsa, Aamin Ya Rabbal Alamin.

**Hadirin Sekalian yang berbahagia,**

Pelatihan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh atau *distance learning* kembali diberlakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM di tahun 2022 ini, sebagai langkah atau strategi penyesuaian proses penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19.

Adapun penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh yang diselenggarakan ini mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 7/K.1//HKM.02.03/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Virus Corona (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Pelatihan.

Metode Pelatihan Jarak Jauh sudah dilakukan oleh BPSDM sejak tahun 2020 di mana pandemi baru melanda Indonesia pada saat itu.

Pelatihan Jarak Jauh pada prinsipnya sama dengan Pelatihan dalam bentuk Klasikal, yang membedakan hanyalah kondisi dan suasana belajarnya. Pelatihan yang biasanya diselenggarakan dalam bentuk klasikal kini berubah menjadi virtual, interaksi antara pengajar dan peserta yang semula bertatap muka secara langsung, kini berubah menjadi bertatap muka melalui layar monitor.

Saya berharap para peserta sekalian dapat membiasakan diri dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang memang sudah menjadi tuntutan dalam perkembangan pembelajaran saat ini.

**Hadirin sekalian**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia,

Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana, sangat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restorative.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tunjuk sebagai koordinator Penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait, dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan pelatihan terpadu SPPA sejak tahun 2013-2021 dengan mencetak jumlah alumni peserta pelatihan sebanyak 2.068 (dua ribu enam puluh delapan) orang dengan pelaksanaan yang terpadu mengikutsertakan Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pekerja Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk nyata hadirnya Negara dalam penanganan kasus anak.

Penyelenggaraan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait bertujuan untuk menyamakan persepsi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam SPPA, untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan sasaran pelatihan terpadu SPPA yaitu 1). Meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restorative, dan diversi dalam SPPA 2). Meningkatnya kompetensi teknis penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan ABH dalam SPPA 3). Terpenuhinya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peserta Yang Berbahagia,

Peningkatan kasus narkotika pada anak-anak dan remaja harus menjadi alarm. Narkoba selain dapat merusak kesehatan berupa menurunnya imun tubuh, narkotika juga menyerang sisi emosional seseorang, dan menyebabkan anak berada di lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengedukasi bahaya narkotika kepada anak.

Pemerintah harus lebih pro aktif dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia dan menjadi tugas kita bersama sebagai Aparatur Sipil Negara dan Aparat Penegak Hukum, pendidik, pengajar, dan orang tua, untuk mencegah anak-anak generasi penerus bangsa terjerumus kedalam lingkaran penyebaran narkoba yang semakin canggih dan terorganisir, demi untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh dimasa yang akan datang.

Para Peserta sekalian,

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam Pembukaan pelatihan terpadu SPPA yang kita laksanakan melalui virtual menjadi salah satu momen yang baik bagi kita semua sebagai Aparatur sipil Negara dan Aparat Penegak Hukum untuk saling mengingatkan dan memberikan pencerahan tentang Bela Negara. Bela Negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi juga segenap warga Negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa usaha Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Pada saat ini perlu adanya sikap bela negara untuk melawan pandemi Virus Corona COVID-19, mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19, walaupun vaksinasi telah dilaksanakan dan hampir sebahagian masyarakat telah menerimanya namun kita harus tetap terus siaga dan waspada yaitu menerapkan protokol kesehatan dengan tetap Memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi serta selalu mengkonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan secara rutin.

Dengan semangat bela negara artinya mengajak untuk kita semua menggalang seluruh kemampuan yang dimiliki dalam membantu Indonesia melewati hari-hari berat dengan tindakan konkrit dan bukti nyata serta pikiran positif dan optimis.

Melalui Pelatihan ini, Peserta diharapkan mendapatkan tambahan ilmu bekal dalam melakukan yang terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi garda terdepan penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak dan terwujudnya persamaan persepsi dalam penanganan kasus anak di tempat tugas Saudara nantinya.

Pada kesempatan ini juga, kami perlu mengingatkan Peserta pelatihan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik selama mengikuti pelatihan. *Knowledge dan skill yang Saudara* peroleh tidak akan berarti jika tidak didukungdengan *attitude* yang baik*.* Jaga kekompakan serta komunikasi yang baik dengan sesama peserta, penyelenggara, dan tenaga pengajar agar terbangun proses belajar yang efektif.

**Hadirin yang berbahagia**

Mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kembali janji kinerja kita dan mengajak terutama bagi para peserta pelatihan dan ASN Kemenkumham, mari “Kita Tingatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” untuk Mewujudkan Indonesia Maju.

Dengan mengucapkan **“*Bismillahirrahmanirrahim”***

Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan LXV (65) Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

***Wabillahi taufiq wal hidayah,***

***Wassalamualaikum Warahmatulahhi Wabarakatuh***

Depok, 10 Februari 2022

 Kepala BPSDM Hukum dan HAM,

Dr. Asep Kurnia

NIP. 196611191986031001